



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.957>

Vol. 7 No. 1 (2024).  
pp. 1087-1102

## Research Article

# Dampak Inflasi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Islam

Moh. Asep Zakariya Ansori<sup>1</sup>, Yadi Janwari<sup>2</sup>, Sofyan Al-Hakim<sup>3</sup>

1. IUQI Bogor; [moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id](mailto:moh.asep.zakariya.ansori@iuqibogor.ac.id) 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [yadijanwari@uinsgd.ac.id](mailto:yadijanwari@uinsgd.ac.id)
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; [sofyanalhakim@uinsgd.ac.id](mailto:sofyanalhakim@uinsgd.ac.id)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 12, 2023  
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 26, 2023  
Available online : January 28, 2024

**How To Cite:** Moh. Asep Zakariya Ansori, Yadi Janwari and Sofyan Al-Hakim (2024) "The Impact of Inflation on the Stability of the Islamic Financial System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 1087–1102. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.957.

## The Impact of Inflation on the Stability of the Islamic Financial System

**Abstract.** High inflation has become a challenge for a country's economy, including the Islamic financial system. The stability of the Islamic financial system is very vulnerable to be affected by inflationary turmoil. This study aims to determine and analyse the impact of inflation on the stability of the Islamic financial system. This research uses a qualitative method with the type of library research. Data were obtained from books, scientific journals, and relevant previous research reports. The data analysis technique uses content analysis with descriptive data presentation. The results showed that inflation exerts significant pressure on the stability of the Islamic financial system through various transmission channels. Inflation increases the cost of funds, the risk of non-performing financing, investment uncertainty, and systemic risk in Islamic financial institutions. On the other hand, price stability is a prerequisite for the stability of the Islamic financial system in carrying out the

intermediation function and optimal allocation of financing. Therefore, the central bank and regulators need to take macroprudential policies to reduce inflationary pressures and maintain the stability of the Islamic financial system through adequate liquidity management, setting risk-based reserves, monitoring financial leverage, and supervising innovative financial products.

**Keywords:** Inflation, Stability, Islamic Financial System.

**Abstrak.** Inflasi yang tinggi telah menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian suatu negara, tak terkecuali sistem keuangan syariah. Kestabilan sistem keuangan syariah sangat rentan terpengaruh oleh gejolak inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak inflasi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik analisis data menggunakan *content analysis* dengan penyajian data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan syariah melalui berbagai saluran transmisi. Inflasi meningkatkan biaya dana, risiko pembiayaan bermasalah, ketidakpastian investasi, dan risiko sistemik pada lembaga keuangan syariah. Di sisi lain, stabilitas harga menjadi prasyarat bagi kestabilan sistem keuangan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi dan alokasi pembiayaan secara optimal. Oleh karena itu, bank sentral dan regulator perlu mengambil kebijakan makroprudensial untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah melalui manajemen likuiditas yang memadai, penetapan cadangan berbasis risiko, pemantauan leverage keuangan, serta pengawasan produk keuangan inovatif.

**Kata Kunci:** Inflasi, Stabilitas, Sistem Keuangan Syariah.

## PENDAHULUAN

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting, dan pertumbuhannya selalu diupayakan agar tetap rendah dan stabil untuk menghindari potensi dampak buruk pada perekonomian. Inflasi dapat berdampak positif maupun negatif pada perekonomian. Ketika ekonomi suatu negara mengalami perlambatan pertumbuhan, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan tingkat suku bunga. Di sisi lain, inflasi yang tinggi dan tidak stabil mencerminkan ketidakstabilan perekonomian, yang dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terus menerus, serta meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka karena harga barang dan jasa yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan, karena banyak individu yang pada awalnya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan kesulitan untuk melakukannya dengan adanya lonjakan harga barang dan jasa.

Indonesia pernah mengalami terjadinya Inflasi yang cukup tinggi pada tahun 1998 dengan angka mencapai 77,6%. Inflasi tersebut diantaranya diakibatkan oleh penyusutan nilai tukar rupiah, krisis ekonomi dan ekspektasi terhadap Inflasi yang tinggi. Sebelumnya Indonesia juga mengalami kejadian hampir serupa dengan mengalami hiper Inflasi pada pada tahun 1966 saat orde lama berakhir. Sehingga secara psikologis Inflasi merupakan krisis bagi masyarakat Indonesia. Salah satu Cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan Inflasi tersebut adalah dengan

menerapkan kebijakan Moneter. Kebijakan moneter didefinisikan sebagai rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, pengendalian inflasi merupakan salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tingkat kebijakan, Indonesia menggunakan 2 (dua) indikator pengukuran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu indikator mikroprudensial dan makroprudensial. Beberapa contoh indikator mikroprudensial meliputi rasio kecukupan modal perbankan, kualitas aset, manajemen sistem keuangan yang sehat, pendapatan dan keuntungan bank, aspek likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, serta sejumlah indikator berbasis pasar lainnya. Di sisi lain, indikator makroprudensial mencakup pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran (*balance of payments*), tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar mata uang, efek menular krisis (*contagion effect*), dan faktor-faktor lain yang relevan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menitikberatkan pada data-data sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya untuk memperoleh data.<sup>2</sup> Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dampak inflasi terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Referensi yang digunakan merupakan referensi primer maupun sekunder yang memuat teori, konsep, temuan, dan bahan kajian lainnya terkait topik Penelitian.<sup>3</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencatat, merekam, dan mengumpulkan data-data dari berbagai referensi yang telah ditentukan. Data yang terkumpul kemudian dikaji untuk memastikan relevansinya dengan topik dan tujuan penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*). Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan relevansi dan kebutuhan pembahasan, dianalisis konten atau isinya, kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif.<sup>4</sup>

## A. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Inflasi dan Sistem Keuangan Islam

---

<sup>1</sup>. Padi Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan* (Bandung: Yrama Widya, 2016), hlm. 186.

<sup>2</sup>. Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 42

<sup>3</sup>. V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 73

<sup>4</sup>. Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 154

## Pengertian inflasi

Inflasi adalah suatu kecenderungan di mana harga-harga umumnya cenderung naik secara terus-menerus. Kenaikan harga pada satu atau dua barang tertentu bukanlah indikasi inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut merambah dan berdampak pada sebagian besar barang lainnya. Ketika inflasi mengalami fluktuasi, maka aktivitas perekonomian cenderung menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ini. Dampak dari kenaikan inflasi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai riil mata uang, yang membuat uang menjadi kurang berharga dalam membeli barang dan jasa. Seiring dengan meningkatnya inflasi, masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama, sehingga daya beli mereka menurun.<sup>5</sup>

Dalam banyak literatur disebutkan bahwa inflasi di definisikan sebagai kenaikan harga umum secara terus menerus dari suatu perekonomian. Menurut Rahardja dan Manurung, inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sedangkan menurut Sukirno, inflasi adalah kenaikan dalam harga barang dan jasa, yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar.<sup>6</sup> Contoh sederhana dari Inflasi adalah:

Contoh 1: Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar. Kenaikan harga BBM ini menyebabkan biaya transportasi dan distribusi semua barang menjadi lebih tinggi. Produsen pun akan menaikkan harga jual produknya untuk menutupi kenaikan biaya. Akibatnya, harga barang-barang kebutuhan masyarakat ikut melonjak. Ini adalah contoh inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi.

Contoh 2: Menjelang hari raya Lebaran, biasanya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan seperti bahan makanan, pakaian baru, dan transportasi meningkat signifikan. Kenaikan permintaan ini tidak diimbangi oleh kenaikan suplai. Akibatnya terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi pada periode tersebut, yang kemudian mereda setelah Lebaran berlalu. Ini merupakan contoh inflasi karena faktor permintaan.

Contoh 3: Nilai ekspor yang lebih rendah dibanding impor akan menyebabkan defisit neraca perdagangan. Defisit ini menyebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Melemahnya nilai tukar akan membuat harga barang impor menjadi lebih mahal. Kenaikan harga barang impor ini mendorong inflasi. Ini merupakan contoh inflasi akibat pelemahan nilai tukar.

Pada Tabel 1 menunjukkan perkembangan Inflasi di Indonesia selama periode tahun 2015-2022. Perkembangan Inflasi di Indonesia pada tahun tersebut mengalami fluktuasi, data tingkat fluktuasi tersebut bisa dilihat pada tabel berikut:

---

5. Boediono. *Ekonomi Makro*. Edisi Keempat. (Yogyakarta: BPFE, 2001). hlm. 161

6. Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana.2008), hlm.175

**Tabel 1.** Trend Inflasi Tahun 2015-2022

Tahun	Inflasi (Prosentase)
2015	3,40
2016	3,30
2017	3,61
2018	3,10
2019	2,72
2020	1,68
2021	1,87
2022	3,87

Sumber: diolah dari Badan Pusat Statistik

Tingkat inflasi Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik dari inflasi Indonesia dengan inflasi dari negara-negara berkembang lainnya. Berdasarkan data tren inflasi dari tahun 2015 hingga 2022, dapat dianalisis:

1. Secara umum, tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015-2020, dimana pada 2015 inflasi mencapai 3,40% dan terus menurun hingga mencapai level terendah 1,68% pada 2020.
2. Namun, pasca 2020 tingkat inflasi kembali menunjukkan peningkatan. Pada 2021 inflasi naik menjadi 1,87% dan kemudian melonjak signifikan di 2022 menjadi 3,87%.
3. Inflasi tertinggi selama periode tersebut terjadi pada 2017 yaitu sebesar 3,61%. Sedangkan inflasi terendah adalah 1,68% pada 2020.
4. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa kondisi inflasi cenderung stabil, dengan mayoritas inflasi berada pada kisaran 1-4% per tahun. Meskipun terjadi lonjakan di 2022, tetapi masih berada dalam batas yang moderat.
5. Pergerakan inflasi perlu terus dipantau karena dapat berpengaruh terhadap berbagai sektor perekonomian. Apabila terus meningkat dan mencapai level tinggi dalam jangka panjang, maka berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

### Jenis-jenis inflasi dan dampaknya

Beberapa jenis inflasi yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Jenis Inflasi Menurut Sifatnya.
  - a) Inflasi merayap (*creeping inflation*) ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka yang relatif lama.
  - b) Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, (biasanya *double digit* atau *triple digit*) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi.

7. Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah*, (Bandung, CV Pustaka Setia), hlm. 132

Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

- c) Inflasi tinggi (*hyperinflation*), inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai/ ditutup dengan mencetak uang.

## 2) Jenis Inflasi Menurut Sebab Terjadinya

Jenis inflasi menurut sebab terjadinya dibagi atas sebagai berikut.<sup>8</sup>

### a) Demand Pull Inflation

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*agregat demand*), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanya akan menaikkan harga (sering disebut dengan inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh, terjadilah *inflationary gap*. *Inflationary gap* inilah yang akan menyebabkan inflasi

### b) Cost Push Inflation

*Cost push inflation* ditandai dengan kenaikan harga dan turunnya produksi. Dengan demikian, inflasi yang disertai dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga dan turunnya produksi.

## 3) Jenis Inflasi Menurut Asal dari Inflasi

Jenis inflasi menurut asal dari inflasi dibagi menjadi sebagai berikut:

### a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul, misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, gagal panen, dan sebagainya

### b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

Penularan inflasi dari luar negeri ke dalam negeri ini dapat mudah terjadi pada negara-negara yang perekonomiannya terbuka. Inflasi ini dapat terjadi karena kenaikan harga-harga di luar negeri sehingga dapat menyebabkan:

- (1) Kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.
- (2) Kenaikan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang diimpor.

---

<sup>8</sup>. Ibid, hlm. 133

- (3) Kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut.

### Sistem Keuangan Islam dan Indikatornya

Stabilitas sistem keuangan Islam merupakan kondisi di mana lembaga-lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik tanpa gangguan yang membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan. Stabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.<sup>9</sup>

Stabilitas moneter dan stabilitas system keuangan ibarat dua sisi dari satu poin yang saling mempengaruhi satu terhadap yang lain. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

**Tabel 2.** Perbandingan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan

	<b>Stabilitas Moneter</b>	<b>Stabilitas Keuangan</b>
Definisi	Stabilnya harga untuk mengendalikan inflasi mengendalikan deflasi.	Kestabilan institusi dan pasar keuangan dan tiadanya tekanan dan pergerakan harga yang berpotensi menyebabkan guncangan perekonomian
Instrumen pengontrol	Kebijakan moneter Suku bunga Operasi pasar.	Sangat terbatas, dan sulit untuk disesuaikan: Fasilitas Pembiayaan Darurat.
Struktur Proyeksi	<i>Trend, Central tendency of distribution</i>	<i>Tails of distribution, Extreme event</i>
Alat Proyeksi	Teknik peramalan standar	<i>Simulasi, Stress test</i>

Sumber: Diadaptasi dari Aspach, et al. (2006) dan Schioppa (2002).

Beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Islam antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Manajemen risiko yang baik pada lembaga keuangan syariah. Ini mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar.
- 2) Tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) pada lembaga keuangan syariah. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan lembaga tersebut.
- 3) Sistem pengawasan dan peraturan yang memadai dari regulator terhadap industri keuangan syariah. Pengawasan ini penting untuk memastikan lembaga syariah beroperasi sesuai ketentuan

<sup>9</sup>. Ascarya, Diana Yumanita, dan Noer Azam Achsan. "Stabilitas Sistem Keuangan: Pendekatan Islam." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 18.1 (2015): 33-52.

<sup>10</sup>. Smolo, Edib dan Mirakhor, Abbas. "Stabilitas Sistem Keuangan Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* Republika, 2011, hlm. 14-15.

- 4) Infrastruktur sistem pembayaran yang efisien dalam mendukung transaksi antar lembaga keuangan syariah.
- 5) Stabilitas makroekonomi, terutama stabilitas nilai tukar, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

### Indikator Stabilitas Sistem Keuangan Islam

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas sistem keuangan Islam antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan indikator penting dari stabilitas sistem keuangan Islam.
- 2) Diversifikasi Risiko: Sistem keuangan Islam telah membuat terobosan signifikan dalam lingkungan global dengan memfasilitasi diversifikasi risiko, yang berkontribusi dalam stabilitas keuangan.
- 3) Kerjasama Internasional: Perlunya koordinasi dan kerjasama internasional dalam pengawasan sistem keuangan Islam lintas negara. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan Islam dalam skala global.
- 4) Kolaborasi di Tingkat Pengawasan: Kolaborasi di tingkat pengawasan sistem keuangan Islam lintas negara juga merupakan indikator penting untuk stabilitas sistem keuangan Islam. Kolaborasi ini fokus pada standar regulasi dan manajemen likuiditas.

### Faktor-faktor yang Memengaruhi Inflasi dan Dampaknya

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi menurut Adiwarmanto A. Karim diantaranya adalah:<sup>11</sup>

#### a. *Natural inflation* dan *human error inflation*.

Sesuai dengan namanya *natural inflation* adalah inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah dan manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam mencegahnya. Misalkan inflasi karena terjadi paceklik. Sementara *human error inflation* adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Ibn Al-Maqrizi<sup>12</sup> mengatakan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya Penawaran Agregatif (AS) atau naiknya Permintaan Agregatif (AD). Maka *natural inflation* akan dapat di bedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut :

- 1) Akibat uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak, dimana ekspor naik sedangkan impor turun sehingga nilai ekspor bersih sangat besar, maka mengakibatkan naiknya Permintaan Agregatif (AD). Hal ini pernah terjadi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin al-Khattab r.a. Pada masa itu kafilah pedagang yang menjual barangnya di luar negeri membeli barang-barang yang mereka jual (*positive net export*). Adanya *positive net export* akan menjadikan keuntungan, keuntungan yang berupa kelebihan uang tersebut akan dibawa masuk ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat akan naik. Naik nya Permintaan

---

<sup>11</sup>. Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 138.

<sup>12</sup>. *Ibid*, hlm. 140



Agregatif, atau grafik dilukiskan sebagai kurva AD yang bergeser ke kanan, akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan .

- 2) Apa yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab r.a untuk mengatasi permasalahan tersebut? Beliau melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya adalah turunnya Permintaan Agregatif (AD) dalam perekonomian. Setelah pelarangan tersebut berakhir maka tingkat harga kembali normal.
- 3) Akibat dari turunnya tingkat produksi (*Agregate Supply [AS]*) karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo atau boikot. Hal ini pernah terjadi pula pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab yaitu pada saat terjadi paceklik yang mengakibatkan kelangkaan gandum, atau dapat digambarkan pada grafik kurva AS bergeser ke kiri, yang kemudian mengakibatkan naiknya tingkat harga-harga. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. terhadap permasalahan ini? Beliau melakukan impor gandum dari Fustat–Mesir sehingga penawaran Agregatif (AS) barang di pasar kembali naik yang kemudian berakibat pada turunnya tingkat harga-harga.

Jadi, Inflasi yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah atau murni akibat perubahan dalam permintaan dan penawaran tidak perlu menjadi sumber kekhawatiran bagi pemerintah. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menjaga stabilitas baik dalam permintaan agregat maupun penawaran agregat, sehingga kondisi ini dapat kembali seperti semula sebelum terjadinya kenaikan harga atau inflasi.

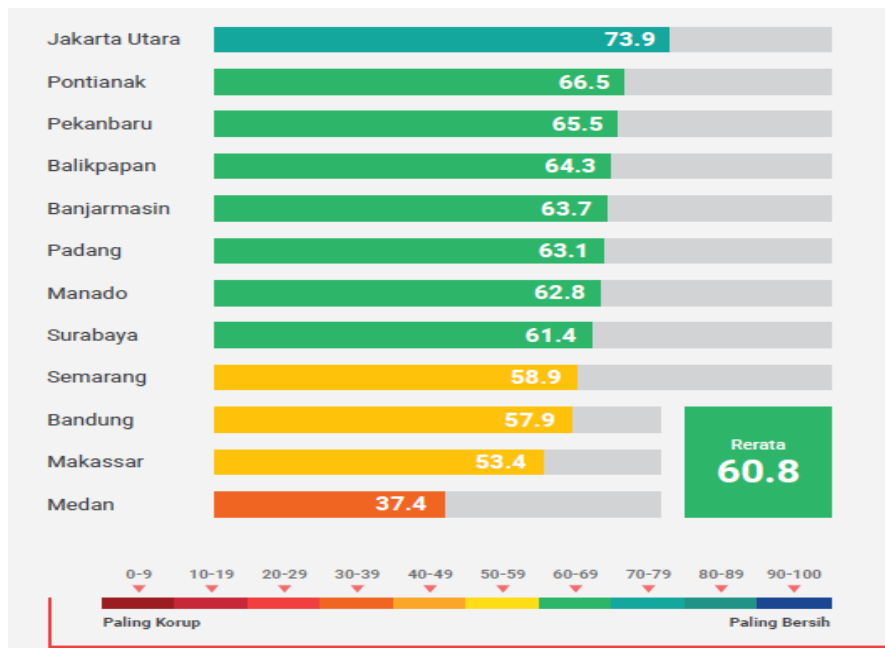
#### b. *Human Error Inflation*

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada *natural inflation*, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai *human error inflation* atau *false inflation*. *Human error inflation* dikatakan sebagai inflasi yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan dari manusia itu sendiri. *Human error inflation* dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:

- 1) Korupsi dan administrasi yang buruk.

Korupsi akan menaikkan tingkat harga, karena produsen harus menaikkan harga jual pada produksinya untuk menutupi biaya-biaya “siluman” yang telah mereka bayarkan. Birokrasi perijinan yang berbelit-belit, dimana hanya untuk pengurusan suatu izin harus melalui beberapa instansi, hal ini tentu akan menambah biaya produksi dari produsen dan berakibat pada kenaikan harga. Hal yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menghilangkan korupsi dan melakukan reformasi birokrasi. Jika menggunakan pendekatan kepada permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS), maka korupsi dan administrasi yang buruk akan menyebabkan kontraksi pada kurva penawaran agregat, yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Selain menyebabkan inefisiensi alokasi sumber daya dan ekonomi biaya tinggi, korupsi dan administrasi yang buruk akan dapat menyebabkan perekonomian terpuruk. Inflasi yang disebabkan korupsi dan administrasi yang buruk. Hasil Survei tentang Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia pada tahun 2017 skor IPK per kota dan rerata 12 kota menunjukkan sebagai berikut:

**Grafik 1.** Indeks Persepsi Korupsi 2017



Sumber: Transparansi Internasional <https://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>

Jika melihat grafik dan gambar di atas, dapat diketahui bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan bahwa:

- 17 % Pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap.
- Kota dengan persentase suap tertinggi adalah Bandung sebesar 10.8% dari total biaya produksi Sementara itu, kota dengan persentase biaya suap terendah adalah Makassar sebesar 1.8% dari total biaya produksi.
- Instansi paling terdampak korupsi adalah Legislatif, Peradilan dan kepolisian.
- Sektor paling terdampak korupsi adalah Perizinan, Pengadaan dan Penerbitan kuota Perdagangan.
- Sektor lapangan usaha yang dinilai paling tinggi potensi suapnya adalah air minum, perbankan dan kelistrikan.
- Lembaga Antikorupsi dipercaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam mencegah dan memberantas korupsi, Sedangkan Partai Politik dianggap mempunyai kemampuan peran dan tata kelola pencegahan dan pemberantasan korupsi yang rendah.
- Penghambat pemberantasan korupsi terbesar adalah karena korupsi bukan dianggap sebagai masalah penting (skor 61.5 dari 100).
- 3 dari 10 pelaku usaha tahu mengenai Stranas PPK dan Aksi PPK daerah
- 5 dari 10 pelaku usaha tahu adanya UU Tipikor
- Biro jasa adalah pihak ketiga yang paling sering digunakan oleh pelaku usaha dalam berinteraksi dengan layanan publik.<sup>13</sup>

<sup>13</sup>. <https://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>

Penyebaran inflasi yang terjadi di Indonesia tidaklah merata. Daerah yang paling rendah mengalami inflasi berdekatan dengan daerah yang inflasinya cukup tinggi. Di Indonesia kesetabilan ekonomi terus memburuk yang direfleksikan dalam pasar komoditi, saham dan pertukaran nilai mata uang. Dalam konsepsi Islam, orientasi ekonomi haruslah memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kesejahteraan rakyat banyak, yang dalam teori ushul fiqh dinamakan *al maslahah al ammah*.

2) Pajak yang berlebihan (*excessive tax*)

Efek yang ditimbulkan oleh pengenaan pajak yang berlebihan pada perekonomian akan memberikan pengaruh yang sama dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh korupsi dan administrasi yang buruk yaitu terjadinya kontraksi pada kurva penawaran agregat. Jika dilihat lebih lanjut, pajak yang berlebihan mengakibatkan pada *efficiency loss* atau *dead weight loss*. Ini termasuk masalah pula dalam perekonomian di Indonesia, terutama pasca penerapan otonomi daerah, dimana setiap daerah memiliki kebijakan tersendiri dalam menggali sektor-sektor yang dapat dijadikan sebagai obyek untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*).

*Seignorage* arti tradisionalnya adalah keuntungan dari pencetakan koin yang didapat oleh percetakannya dimana biasanya percetakan tersebut dimiliki penguasa. Pencetakan uang yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan terlalu banyaknya jumlah uang beredar di masyarakat, hal ini berimplikasi pada penurunan nilai mata uang. Hal ini telah terbukti di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, di mana kebutuhan anggaran pemerintah dibiayai oleh pencetakan uang. Namun Karena berlebihan hal ini dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

4) *Actual/anticipated/expected inflation* dan *unanticipated/ unexpected inflation*.

Pada *expected inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi. Sedangkan pada *unexpected inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi.

5) *Demand pull inflation* dan *cost push inflation*.

*Demand pull inflation* diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. *Cost push inflation* adalah inflasi yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat dari barang dan jasa pada suatu perekonomian.

6) *Spiraling inflation*

Inflasi jenis ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh inflasi yang terjadi sebelumnya dimana inflasi yang sebelumnya itu terjadi sebagai akibat dari inflasi yang terjadi sebelumnya lagi dan begitu seterusnya.

Selain itu, Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi antara lain:

- 1) Meningkatnya kegiatan ekonomi sehingga ada peningkatan permintaan agregat tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian.
- 2) Melemahnya nilai tukar rupiah sehingga harga cenderung naik dan sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat.
- 3) Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan seperti kenaikan harga BBM, listrik, menaikkan upah minimum dan gaji pegawai.
- 4) Tingginya ekspektasi inflasi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap konsumsi sehingga memicu kenaikan harga.<sup>14</sup>

### **Strategi Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Islam di Tengah Inflasi Tinggi**

Agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perekonomian, sistem keuangan Islam perlu memiliki proporsi yang lebih besar terhadap total aset keuangan, minimal sekitar 20%. Oleh karena itu, pemerintah, bank sentral, dan para pemangku kepentingan ekonomi yang mendukung pengembangan sistem keuangan Islam perlu melakukan upaya yang lebih intensif. Terkait hal ini, setidaknya ada lima langkah yang dapat diambil untuk mempercepat pertumbuhan sistem keuangan syariah, baik dalam skala nasional maupun internasional.

*Pertama:* Perlu diperkuatnya sistem pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Islam menjadi suatu kebutuhan mendesak. Tingkat pertumbuhan keuangan Islam bervariasi di berbagai negara, dan tingkat perkembangan ini erat terkait dengan efektivitas pengaturan dan pengawasan. Adanya sistem keuangan yang kurang optimal di beberapa negara dapat disebabkan oleh ketidakmemadaiannya peraturan dan pengawasan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk mengisi kesenjangan dalam pengaturan yang ada.

*Kedua,* Diperlukan koordinasi dan kerjasama internasional yang lebih kuat dalam konteks sistem keuangan Islam. Meskipun secara prinsip, sistem keuangan Islam dianggap lebih tahan dan stabil terhadap guncangan keuangan, namun di dunia nyata, penting untuk menyadari bahwa operasional sistem keuangan Islam tidak dapat terlepas sepenuhnya dari sistem keuangan konvensional. Dalam situasi seperti ini, kerja sama dan koordinasi internasional menjadi suatu keharusan. Saat ini, beberapa lembaga internasional seperti *International Financial Services Board (IFSB)* di Malaysia, *International Islamic Financial Markets (IIFM)*, dan *Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* di Bahrain telah berperan dalam membantu mengatur dan mengawasi aspek-aspek tertentu dari sistem keuangan Islam. Penting untuk memperkuat dan meningkatkan peran institusi-institusi ini guna menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang di arena keuangan global.

*Ketiga,* Diperlukan kolaborasi yang lebih erat di tingkat pengawasan sistem keuangan Islam lintas negara. Meskipun banyak lembaga keuangan Islam beroperasi secara global, namun kerjasama dalam pengawasan lintas negara masih terlihat

---

<sup>14</sup>. M. Ridwan, *Ekonomi Makro dan Mikro Islam*, (Jakarta : Citapustaka Media, 2013), hlm. 178

kurang memadai. Sebagian besar upaya kolaboratif dalam sistem keuangan Islam saat ini cenderung terfokus pada penyusunan standar regulasi dan manajemen likuiditas.

*Keempat*, Diperlukan model bisnis di sektor perbankan syariah yang lebih menekankan sektor riil daripada pasar keuangan, untuk mempromosikan pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan terhadap tekanan krisis keuangan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia mencerminkan adaptasi model bisnis yang memperhitungkan permintaan di sektor riil, perlu tetap ditingkatkan pengembangan produk keuangan Islam yang inovatif dan sesuai dengan tuntutan pasar global.

*Kelima*, Diperlukan penetapan acuan *rate of return* yang sesuai dengan prinsip Islam untuk memastikan semangat berbagi keuntungan dan kerugian dalam sistem keuangan Islam. Saat ini, terlihat kecenderungan lembaga keuangan Islam mengacu pada *rate of return* dari sistem perbankan konvensional, yaitu suku bunga. Perilaku ini membawa risiko terhadap reputasi lembaga keuangan Islam karena tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari sistem keuangan berbasis syariah. Penting untuk menyesuaikan acuan *rate of return* agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, guna memitigasi risiko reputasi dan memperkuat integritas lembaga keuangan Islam itu sendiri.

Selain dari kelima hal di atas, diperlukan adanya pengendalian inflasi, di dunia konvensional pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan:

a. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter didefinisikan dengan rencana dan tindakan otoritas moneter yang terkoordinasi untuk menjaga keseimbangan moneter, kestabilan nilai uang, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>15</sup> Senada dengan itu, Menurut Adiwaman Karim Inflasi dapat diatasi dengan mengurangi M (jumlah uang yang beredar) dan atau/ V (kecepatan peredaran uang) atau menaikkan T (barang yang diperdagangkan). Kebijakan Moneter ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral, dimana yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat agar stabil. Untuk mengatasi Inflasi kebijakan Moneter sasaran utamanya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan mempersulit pemberian kredit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang dimaksud "*Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga*". Menurut Adiwaman Karim ada empat cara yang dilakukan bank sentral untuk mengatasi Inflasi, yaitu:

- (1) Politik diskonto, yaitu mengatasi Inflasi dengan menaikkan tingkat suku bunga sehingga masyarakat gemar menabung dan kemudian peredaran uang di masyarakat akan berkurang sehingga Inflasi akan dapat diatasi.
- (2) Politik pasar terbuka, dengan menjual surat-surat berharga agar jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang.

---

<sup>15</sup>. Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Bandung:Yrama Widya, 2006), hlm. 186

- (3) Politik cadangan kas dengan menaikkan cash ratio yang digunakan untuk mengurangi jumlah pemberian kredit yang disediakan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan keseimbangan neraca pembayaran internasional, kesempatan kerja, kestabilan harga, stabilitas ekonomi. Tujuan akhir sebuah kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak sama dari satu negara dengan negara lainnya serta tidak sama dari waktu ke waktu.

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (*social welfare*). Untuk mencapai tujuan kebijakan moneter sebagaimana sudah diungkapkan di atas, maka bank sentral mengeluarkan berbagai instrumen atau alat untuk mempengaruhi situasi perekonomian sehingga bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan pemerintah. Kebijakan moneter dengan sasaran tunggal, yaitu stabilisasi harga (pengendalian tingkat inflasi), pada umumnya menggunakan pendekatan harga. Sedangkan kebijakan moneter dengan sasaran multi, yaitu disamping stabilisasi harga juga pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran, pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas.<sup>17</sup>

#### b. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal merupakan serangkaian tindakan resmi pemerintah atau negara terkait penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai kestabilan ekonomi.<sup>18</sup> Kebijakan fiskal di Indonesia secara umum di atur di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. Kebijakan fiskal di Indonesia adalah cerminan dari bagaimana pemerintah mengatur pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan stabilitas harga<sup>19</sup>. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:

- (1) Untuk Meningkatkan Laju Investasi.
- (2) Untuk Mendorong Investasi Optimal Secara Sosial.
- (3) Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja.
- (4) Untuk Meningkatkan Stabilitas Ekonomi.
- (5) Untuk Menanggulangi Inflasi.

---

<sup>16</sup>. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 141

<sup>17</sup>. Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan"*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2005), hlm. 47

<sup>18</sup>. I Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2.

<sup>19</sup> Indra Maipita, Mohd Dan Jantan, and Nor Azam Abdul Razak, "DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA," *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 12, no. 4 (November 19, 2010): 421–56, <https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.248>.

(6) Untuk Meningkatkan Dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional.<sup>20</sup>

c. Kebijakan nonmoneter dan nonfiscal

Kebijakan nonmoneter dan nonfiscal adalah kebijakan pemerintah dalam menekan laju inflasi tanpa memengaruhi jumlah peredaran uang di masyarakat maupun pendapatan dan pengeluaran negara. Contoh kebijakan nonmoneter dan nonfiscal untuk mengatasi inflasi meliputi: (1) Peningkatan produksi dan peningkatan jumlah barang di pasaran. (2) Kebijakan upah dengan menaikkan upah riil. (3) Pengendalian dan pengawasan harga seperti menetapkan kebijakan harga maksimum.

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat penting untuk dipantau karena berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan. Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil mencerminkan ketidakstabilan perekonomian yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa secara umum.
2. Stabilitas sistem keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti manajemen risiko, tata kelola perusahaan, sistem pengawasan regulasi, infrastruktur sistem pembayaran, dan stabilitas makroekonomi suatu negara.
3. Beberapa strategi utama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah di tengah inflasi tinggi adalah memperkuat sistem pengaturan dan pengawasan, meningkatkan koordinasi dan kerja sama internasional, kolaborasi pengawasan lintas negara, mengembangkan model bisnis yang lebih berorientasi sektor riil, dan menetapkan acuan tingkat pengembalian yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Diperlukan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, bank sentral, regulator, dan pelaku industri untuk bersama-sama mewujudkan sistem keuangan syariah yang tangguh dan stabil guna mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Aliminsyah, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Bandung:Yrama Widya, 2006),
- Ascarya, Diana Yumanita, dan Noer Azam Achsani. "Stabilitas Sistem Keuangan: Pendekatan Islam." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 18.1 (2015):
- Boediono. *Ekonomi Makro*. Edisi Keempat. (Yogyakarta: BPFE, 2001).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),

---

<sup>20</sup>. Ridwan and Ichsan Suciawan Nawir, *Buku Ekonomi Publik*, ed. Muhammad Fadil Ridwan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 183-184

- Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan. "Kebijakan Moneter dan Perbankan", (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: 2005),
- Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001),  
<https://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/>
- I Wayan Sudirman, Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Teori Dan Empirikal (Jakarta: Kencana, 2014),
- M. Ridwan, Ekonomi Makro dan Mikro Islam, (Jakarta : Citapustaka Media, 2013),
- Nurul Huda, Ekonomi Makro Islam, (Jakarta: Kencana.2008),
- Padji Aliminsyah, Kamus Istilah Keuangan Dan Perbankan (Bandung: Yrama Widya, 2016),
- Ridwan and Ichsan Suciawan Nawir, Buku Ekonomi Publik, ed. Muhammad Fadil Ridwan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021),
- Smolo, Edib dan Mirakhor, Abbas. "Stabilitas Sistem Keuangan Islam." Jurnal Ekonomi Islam Republika, 2011,
- V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),
- Vinna Sri Yuniarti, Ekonomi Makro Syariah, (Bandung, CV Pustaka Setia),
- Indra Maipita, Mohd Dan Jantan, and Nor Azam Abdul Razak, "DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP KINERJA EKONOMI DAN ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA," Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 12, no. 4 (November 19, 2010): 421–56, <https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.248>.